

“Kartu Kuning” untuk Pemkot dan Kontraktor DPRD: Perlu Evaluasi Serius dan Menyeluruh



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 24/07/2024

Keterlambatan proyek peningkatan jalan di Jembatan Achmad Amins, menambah daftar masalah baru.

SAMARINDA – Meski dalam waktu dekat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda akan mengubah skema untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, para wakil rakyat kembali mengingatkan pihak terkait untuk segera melaksanakan evaluasi, khususnya di sektor perbaikan jalan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan upaya pemerintah untuk membenahi jalan pada dasarnya bagus, terlebih untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, keterlambatan perbaikan tersebut dipandang perlu adanya evaluasi.

“Tapi yang mau dievaluasi ini yang mana, wali kota atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, atau lebih ke kontraktornya. Saya meragukan masalah itu ada pada OPD terkait, juga termasuk kontraktornya,” ucapnya, Selasa (23/7).

Dalam suatu pengerjaan proyek perbaikan jalan, ada mekanisme perencanaan. Mestinya, kata dia, di dalam perencanaan tersebut, pihak terkait dalam hal ini DPUPR atau kontraktor sudah bisa memperhitungkan material atau alat yang digunakan. Sehingga, hal-hal yang memungkinkan bisa menghambat proses perbaikan tersebut tidak dapat terjadi.

“Itu kalau ada perencanaannya. Tapi saya yakin perencanaan tersebut sudah ada, namun belum bagus. Pernah kami tanyakan beberapa kali, dan jawabannya alasan klasik. Yakni, keterlambatan bahan,” sambungnya.

Ditambahkan Angkasa, sekali lagi bahwa program pemerintah memiliki tujuan yang bagus. Namun jika tidak disokong OPD yang kurang bagus, maka hasilnya tak sesuai

ekspektasi atau target. Sehingga, Angkasa melanjutkan, keterlambatan itu bisa mengganggu arus lalu lintas. Pun warga terdampak atas keterlambatan tersebut.

“Jadi kalau begini pelayanan publik terkesan kurang baik dan warga yang terkena getahnya, padahal proses pengerjaan itu kan sudah direncanakan sedemikian rupa, ada kalkulasi yang jelas dalam pengerjaan tersebut,” tuturnya.

Selain dari masalah perbaikan jalan di Jembatan Achmad Amins, Angkasa juga mengingatkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk memperhatikan lalu lintas di kawasan jembatan tersebut.

“Dulu beberapa waktu lalu informasinya ditutup, ternyata sistemnya buka tutup dan pada hari Minggu (21/7), saya kebetulan lewat jembatan tersebut. Untuk bisa melewati jembatan itu memakan waktu setengah jam, karena kemacetan terjadi. Ini bisa berisiko kalau tidak diperhatikan dan berbahaya untuk pengguna jembatan tersebut,” timpal Angkasa. “Sebab, setahu saya jembatan itu tidak boleh terjadi kemacetan dan risikonya besar karena daya beratnya tidak seperti sebelumnya,” kuncinya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, “Kartu Kuning” untuk Pemkot dan Kontraktor DPRD: Perlu Evaluasi Serius dan Menyeluruh, 24/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022), preservasi jembatan dan terowongan jalan merupakan upaya untuk mencegah penurunan mutu dan kerusakan jembatan dan terowongan jalan serta untuk memperpanjang umur layan jembatan dan terowongan jalan.
2. Diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Permen PUPR 10/2022 bahwa dalam pembangunan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, pengelola melakukan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan selama masa konstruksi; dan
 - d. penyiapan rencana tindak tanggap darurat.